



BKPSDM
Kab. Tanjab Barat

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 dapat diselesaikan sebagai bentuk hasil kinerja selama tahun 2021.

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis pada Capaian kinerja tahun ke I yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2021-2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kami telah berusaha dengan maksimal dalam menyusun Laporan Kinerja ini dan masih jauh dari sempurna, dan kami sadari bahwa kinerja yang telah dicapai masih belum optimal dan memerlukan kerja keras untuk mewujudkan perbaikan kedepannya. Kritik dan saran kami harapkan agar menjadi masukan agar Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 bisa lebih baik lagi.

Kuala Tungkal, Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,



H.R. GATOT SUWARSO, SH, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19631017 199003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
1.5 Struktur Organisasi	5
1.6 Sumber Daya Organisasi.....	7
1.7 Sistematika Penyajian.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis dan Target Tahun 2020	10
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	15
3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	43
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	44
3.4 Capaian Rencana Strategis Periode Pelaksanaan Tahun 2021	45
3.5 Analisis Penyebab Kegagalan/ Keberhasilan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	49
3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	51
3.6 Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	51
3.7 Realisasi Anggaran.....	58
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja.....	61

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai lembaga penyelenggara manajemen kepegawaian daerah berkomitmen untuk memajukan dan mengembangkan Sistem Manajemen Kepegawaian yang efektif dan efisien, agar mampu mendorong peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kualitas pelayanan publik sehingga tercipta tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Laporan Kinerja berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026.

Laporan Kinerja tersebut merupakan perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menjawab, menerangkan kinerja serta tindakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Kepala Daerah sebagai pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut.

Indikator Kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, indikator kinerja sasaran strategis ini merupakan indikator kinerja *Output* dan atau *Outcome* dari kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Indikator kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja mulai dari masukan (*Input*), keluaran (*Output*), dan hasil (*Outcome*) sesuai yang telah disepakati dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

I.2 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 disusun berpedoman pada:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme;

- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
- m. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- o. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- p. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23).
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
- x. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- y. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 24).

I.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban dan komitmen sesuatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang berisikan tentang informasi keberhasilan maupun kegagalan melaksanakan misi suatu organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan perjanjian kinerja, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021.
- b. Sebagai bahan acuan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan pada periode yang akan datang di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang.
- d. Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

I.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Secara umum aparatur dapat diartikan sebagai alat “Negara” namun ada juga yang beranggapan bahwa aparatur diartikan sebagai “pegawai negeri” yang mengandung pengertian sebagaimana tertuang dalam Undang–undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian pada Pasal I huruf a berbunyi: “Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam jabatan negeri atau disertai tugas Negara Lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu perundang-undangan dan digaji menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kondisi Kepegawaian dalam hal ini mengacu pada kepegawaian sebagai suatu system penyelenggaraan manajemen ASN, termasuk di dalamnya Aparatur Sipil Negara sebagai Sumber Daya Manusia Aparatur yang ada (*Existing system*). Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Mutasi Promosi dan Penilaian Kinerja Aparatur, serta Pengadaan, Status dan Informasi Kepegawaian;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Mutasi Promosi dan Penilaian Kinerja Aparatur, serta Pengadaan, Status dan Informasi Kepegawaian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Mutasi Promosi dan Penilaian Kinerja Aparatur, serta Pengadaan, Status dan Informasi Kepegawaian;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Mutasi Promosi dan Penilaian Kinerja Aparatur, serta Pengadaan, Status dan Informasi Kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

I.5 Susunan Organisasi

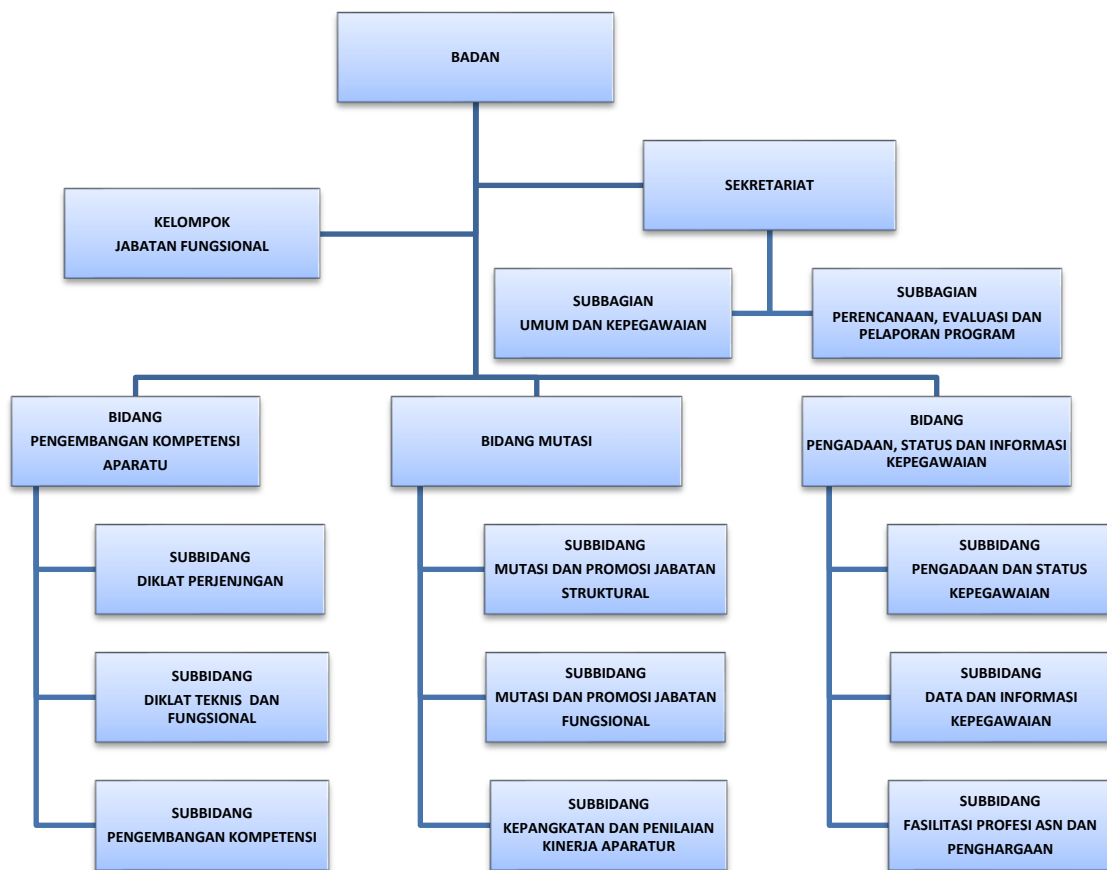
Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

- a. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub. Bagian Umum dan Keuangan
 - 2) Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
- c. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
 - 1) Sub. Bidang Diklat Perjenjangan
 - 2) Sub. Bidang Diklat Teknis dan Fungsional
 - 3) Sub. Bidang Pengembangan Kompetensi
- d. Bidang Mutasi
 - 1) Sub. Bidang Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural
 - 2) Sub. Bidang Mutasi dan Promosi Jabatan Fungsional

- 3) Sub. Bidang Kepangkatan dan Penilaian Kinerja Aparatur
- e. Bidang Pengadaan, Status dan Informasi Kepegawaian
 - 1) Sub. Bidang Pengadaandan Status Kepegawaian
 - 2) Sub. Bidang Data dan Informasi Kepegawaian
 - 3) Sub. Bidang Fasilitasi Propesi ASN dan Penghargaan

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 lebih jelas sebagaimana berikut ini:

Tabel I.I
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



I.6 Sumber Daya Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, personil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejumlah 72 Orang terdiri dari:

TABEL I.2
JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Uraian	Jumlah	Pria	Wanita
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Jumlah pegawai berdasarkan Eselon :			
	- Eselon II	1	1	-
	- Eselon III	4	3	1
	- Eselon IV	11	6	5
2.	Jumlah pegawai berdasarkan jumlah pendidikan :			
	- S.3	-	-	-
	- S.2	1	1	-
	- S.1/DIV	23	14	9
	- D. III	1	-	1
	- SLTA	8	7	1
3.	Jumlah pegawai berdasarkan status :			
	- PNS	33	22	11
	- Non PNS	29	14	15

Sumber Data BKPSDM tahun 2021

Untuk kelancaran dalam melaksanakan program dan kegiatan agar dapat selesai tepat waktu serta mencapai hasil sesuai dengan tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan perlu didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas dan kuantitas. Adapun fasilitasi yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tercatat sampai dengan Desember tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel I.3
REKAPITULASI ASET
TAHUN 2020

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1	2	3
1.	Tanah	1.503.675.000
2.	Peralatan dan Mesin	3.160.909.250
3.	Gedung dan Bangunan	7.142.580.265
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	214.164.184
5.	Aset Tetap Lainnya	-
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	11.814.000
TOTAL		12.033.142.699

Sumber Data BKPSDM tahun 2021

I.7 Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 dapat di ikhtisarkan sebagai berikut:

BAB I

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB II

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ Ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Capaian rencana strategis periode pelaksanaan tahun berjalan;
5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
8. Realisasi anggaran;

BAB IV

Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menandatangani Perjanjian Kinerja untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Tahapan Perencanaan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 yang pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai pembaharuan, penataan dan perbaikan terhadap system kebijakan termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.1. Rencana Strategis dan Target Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya manusia aparatur yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban bupati terkait dengan penetapan atau kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibuat pada masa jabatannya, Dengan demikian penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. dalam arti sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 merupakan salah satu pendukung RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 karena Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tupoksi sebagai perangkat daerah yang mengelola aparatur sehingga ada keterkaitannya dengan Misi-3 RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yakni Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan public.

Visi adalah arah pandang kedepan tentang tujuan yang akan dicapai organisasi. Untuk mendukung capaian Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menetapkan visinya harus mengacu pada visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya, Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 yaitu :

Visi

“Mewujudkan Tanjung Jabung Barat Berkah”

(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis)

Memperhatikan visi tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan manajemen kepegawaian pada masa yang akan datang, maka dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan yang ingin dicapai atau dihasilkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam jangka I (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu suatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Instansi pemerintah untuk jangka waktu jangka pendek (satu tahun) dalam rentang waktu masa Renstra. Adapun tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.I
TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM KAB. TANJAB BARAT

Kode	Tujuan (T)
T.I	Terwujudnya ASN yang profesional, kompeten dan kompetitif .

Kode	Sasaran (S)
S.I	Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme ASN.
S.2	Meningkatnya Penataan dan Kinerja ASN

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPSDM

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-N					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Terwujudnya ASN yang profesional, kompeten dan kompetitif		Indeks Profesionalitas ASN	65	68	71	73	75	77
		Meningkatnya kualitas dan profesionalisme aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	7,3%	8,2%	9,2%	10,3%	11,6%	12%
			Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal	5,9%	7,1%	8,4%	9,7%	11,2%	12,2%
		Meningkatnya penataan dan kinerja ASN	Persentase penetapan jabatan sesuai kompetensi	92%	92%	92%	92%	93%	93%
			Rasio pejabat fungsional tertentu	53,9%	55,9%	56,3%	56,7%	56,9%	61%
			Tingkat penurunan pelanggaran disiplin ASN	25%	25%	25%	25%	25%	25%

2.2 Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan suatu dokumen yang berisikan penyusunan dari pimpinan instansi yang lebih

tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan pernyataan perjanjian kinerja tingkat satuan kerja perangkat daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 terdiri dari 5 sasaran strategis dan 9 indikator kinerja.

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme ASN	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	7.3%
		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	5.9%
2.	Peningkatan Penataan Kinerja ASN	Persentase Penetapan Jabatan sesuai Kompetensi	92%
		Rasio Pejabat Fungsional Tertentu	53.9%
		Tingkat Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	25%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP BKPSDM	60
		Maturitas SPIP BKPSDM	Level 2
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83%
5.	Meningkatnya Kinerja Penganggaran, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan	85%

Tabel 2.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN = 65	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Hasil Penilaian Indeks Profesionalitas ASN dari BKN	BKPSDM
		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal = 7,3%	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal}}{\text{Jumlah Total ASN}} \times 100$	Rekapitulasi Data Peserta Diklat Formal	BKPSDM
		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal = 5,9%	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal}}{\text{Jumlah Total ASN}} \times 100$	Rekapitulasi Data Peserta Diklat Non Formal	
2.	Meningkatnya Penataan dan Kinerja ASN	Persentase Penetapan Jabatan sesuai kompetensi = 92%	$\frac{\text{Jumlah Pejabat Struktural yang terisi}}{\text{Jumlah Jabatan Struktural}} \times 100$	Rekapitulasi Penetapan Pejabat Struktural	BKPSDM
		Rasio Pejabat Fungsional Tertentu = 53,9%	$\frac{\text{Jumlah Pejabat Fungsional tertentu}}{\text{Jumlah Total ASN}} \times 100$	Rekapitulasi Penetapan Pejabat Fungsional Tertentu	BKPSDM
		Tingkat Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN = 25%	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun lalu} - \text{Jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun berjalan}}{\text{Jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun lalu}} \times 100$	Rekapitulasi Pelanggaran Disiplin	BKPSDM

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pengemban amanat di bidang pengelolaan SDM aparatur melaksanakan kewajibannya untuk menginformasikan tingkat akuntabilitas kinerjanya melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA tahun 2021-2026 maupun Renja tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah.

3.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Indikator kinerja dari sasaran strategis disusun berdasarkan isu-isu strategis yang menjadi permasalahan atau hal-hal yang perlu dilakukan peningkatan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam kewenangannya melaksanakan peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, dalam rangka pengukuran kinerja, indikator yang digunakan adalah Indikator sasaran strategis dan Indikator kegiatan. Indikator Kinerja sasaran strategis adalah yang menggambarkan tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Indikator kinerja kegiatan terdiri dari indikator input, output dan outcome untuk setiap kegiatan. Selanjutnya setiap indikator kinerja ditetapkan satuan, target dan realisasinya. Dari perbandingan antara target dan realisasi tersebut dihasilkan capaian kinerja. Berikut ini disampaikan tingkat capaian kinerja sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021.

3.1.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel 3.I
Capaian Realisasi IKU BKPSDM
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

NO	SASARAN KINERJA	IKU	TARGET	REALISASI	RASIO CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualiatas dan Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN	65	48,9	75%
		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	7,3%	8,2%	112%
		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	5,9%	9,6%	162%
2.	Meningkatnya Penataan dan Kinerja ASN	Persentase Penetapan Jabatan sesuai Kompetensi	92%	81,5%	89%
		Rasio Pejabat Fungsional Tertentu	53,9%	60,8%	113%
		Tingkat Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	25%	37,5%	150%

Pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif, dari data diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 BKPSDM mempunyai 6 indikator sasaran dengan realisasi kinerja capaian keseluruhan terdapat 4 indikator yang memenuhi target dan 2 indikator yang belum memenuhi target. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tujuan I : Terwujudnya ASN yang profesional, kompeten dan kompetitif**SASARAN STRATEGIS I****Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme ASN**


Secara umum pengertian sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua yakni sumber daya manusia secara makro dan mikro, pengertian sumber daya manusia secara makro adalah jumlah penduduk usia produktif yang ada di sebuah negara. Sedangkan pengertian sumber daya manusia mikro lebih mengerucut pada individu yang bekerja pada sebuah institusi. Sumber daya manusia adalah suatu proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi.

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan (*capability*) atau keahlian (*expertise*) yang lebih dari sekedar keterampilan (*skill*) belaka, Kompetensi juga merupakan hasil dari pengalaman yang melibatkan pemahaman atau pengetahuan, tindakan nyata serta proses mental yang terjadi dalam jangka waktu tertentu serta berulang-ulang sehingga menghasilkan kemampuan atau keahlian dalam bidang tertentu. Oleh karena itu dikatakan pula bahwa kompetensi dibentuk oleh interaksi antara faktor pengalaman dan faktor bawaan. Kompetensi digunakan pula untuk menggambarkan pengelompokan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam pekerjaan. Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara dapat diperoleh melalui pengalaman pekerjaan dan diklat. Untuk itu, dalam pencapaian sasaran strategis ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan analisis terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama.

A. Indeks Profesional ASN

Indeks profesional ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi Pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Pada tahun 2021 ditargetkan Indeks profesional ASN Kab. Tanjung Jabung Barat 65 dengan realisasi 48,9, Nilai tersebut berdasarkan penilaian sampai dengan Januari 2022 akan tetapi realisasi tahun 2021 tersebut dapat berubah dikarenakan proses penginputan data indeks masih dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu sampai dengan 22 Maret tahun 2022 berdasarkan surat BKN No. 870/B-BH.02.01/SD/C/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal pengukuran Indeks Profesional ASN Tahun 2021, dengan capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Hasil Penilaian Indeks Profesional ASN



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Ciliitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 890/B-BH.02.01/SD/C/2022 Jakarta, 13 Januari 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021

Kepada Yth.
Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD/BKPSDM/BKPP
(Daftar Instansi Terlampir)
di Tempat

- Dalam rangka melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021 yang dilaksanakan secara nasional sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan dengan menggunakan aplikasi online di alamat website <https://ip-iasn.bkn.go.id>
 - Mekanisme penginputan tiap unsur instrumen pengukuran dilakukan melalui *updating* pada aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).
- Mengingat Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sebagai bagian dari penilaian Reformasi Birokrasi, maka:
 - Setiap Instansi wajib menginformasikan kembali satu nama pegawai yang ditunjuk untuk bertanggung jawab sebagai admin aplikasi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN ke link <https://s.id/adminip>
 - Mengunggah surat pernyataan telah melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang ditandatangani minimal Pejabat Eselon 2 ke aplikasi Indeks Profesionalitas ASN.

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	6.127	12,83	9,97	19,92	5,00	47,72	Sangat Rendah
Pemerintah Kota Pagar Alam	2.670	14,12	8,73	16,42	4,99	44,26	Sangat Rendah
Pemerintah Kota Palembang	9.892	13,98	7,81	9,56	5,00	36,34	Sangat Rendah
Pemerintah Kota Pangkal Pinang	2.650	13,02	7,64	6,23	4,99	31,89	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Penuk Abab Lematang Ilir	1.769	13,47	6,66	16,97	5,00	42,10	Sangat Rendah
Pemerintah Kota Prabumulih	3.334	14,07	7,54	4,69	5,00	31,30	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Rejang Lebong	4.153	13,19	8,09	20,40	4,98	46,67	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Sarolangun	4.107	12,22	9,03	24,13	5,00	50,38	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Seluma	3.301	13,86	8,69	1,77	5,00	29,31	Sangat Rendah
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	14.049	15,23	14,02	22,35	5,00	56,60	Sangat Rendah
Pemerintah Kota Sungai Penuh	2.864	13,89	7,81	0,71	5,00	27,41	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	3.724	12,49	8,74	22,65	5,00	48,88	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur	3.632	12,49	8,87	4,40	5,00	30,77	Sangat Rendah
Pemerintah Kab. Tebo	3.463	12,25	9,50	2,95	4,99	29,68	Sangat Rendah

Sumber Data Bidang PSIK

B. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal pada Indikator ini merupakan jumlah Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti Diklat Formal pada tahun 2021, dengan capaian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Analisis Capaian IKU

No	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Capaian s/d Tahun 2020	Realisasi Capaian s/d Tahun 2021		Jumlah
			Target	Realisasi	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Persentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal					
I	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	265 Org	30 Org	52 Org	317 Org
Formulasi: $\left[\frac{\text{Jumlah Aparatur yang telah mengikuti diklat formal}}{\text{Jumlah Total Aparatur}} \right] \times 100$					$\frac{317}{3862} \times 100 = 8,2\%$

Sampai dengan tahun 2021 total aparatur yang mengikuti diklat formal sebanyak 317 orang atau bertambah 52 orang dibanding tahun sebelumnya, sedangkan jumlah pegawai Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan Tahun 2021 ini sebanyak 3862 orang, sehingga persentase aparatur yang mengikuti diklat formal ditargetkan sebesar 7,3% dengan realisasinya pada tahun 2021 sebesar 8,2% atau mengalami kenaikan sebesar 112%.

Tabel 3.4
Data Pendukung Pendidikan dan Pelatihan Formal

No	OPD / SKPD	NAMA / NIP	JABATAN	DIKLAT, BIMTEK, WORKSHOP YANG DIKUTI	Keterangan
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	RSUD DAUD ARIFF	1 ABRAR IBRAHIM, AMKL NIP.19890714 201903 1 001	Sanitarian Terampil	Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Jenjang Trampil.	16 s/d 26 Nopember 2021 secara FullDaring

2	BKPSDM	2 PRAYUDHI, SE NIP.19850616 201903 1 002	Auditor Kepegawaian	Pelatihan Fungsional Auditor Kepegawaian	PusbangBKN Secara Online 12 Juli s/d 04 Agustus 2021
3	DINAS KESEHATAN	3 EMI YANTI, SKM NIP.19780617 201001 2 003	Kasubbag TU PKM Senyerang	Diklat Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM) Jenjang Ahli di Hotel V Kota Jambi.	pembelajaran secara daring / zoom meeting yang dilaksanakan tanggal 24 Agustus s/d 02 September 2021 dan secara luring/klasikal yang dilaksanakan tanggal 06 s/d 08 September 2021 di Hotel V Kota Jambi
		4 APRINDA, SKM NIP.19840414 200904 2 003	Ka. Tata Usaha PKM Pelabuhan Dagang	Diklat Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM) Jenjang Ahli di Hotel V Kota Jambi.	pembelajaran secara daring / zoom meeting yang dilaksanakan tanggal 24 Agustus s/d 02 September 2021 dan secara luring/klasikal yang dilaksanakan tanggal 06 s/d 08 September 2021 di Hotel V Kota Jambi
		5 HARYATI, SKM NIP.19880527 201903 2 001	Calon Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama PKM Pelabuhan Dagang	Diklat Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM) Jenjang Ahli di Hotel V Kota Jambi.	pembelajaran secara daring / zoom meeting yang dilaksanakan tanggal 24 Agustus s/d 02 September 2021 dan secara luring/klasikal yang dilaksanakan tanggal 06 s/d 08 September 2021 di Hotel V Kota Jambi
		6 VENI JAYA SURYANTI, SKM NIP.19830927 200904 2 005	Ass. Apoteker Pel. Lanjutan PKM II Kuala Tungkal	Diklat Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM) Jenjang Ahli di Hotel V Kota Jambi.	pembelajaran secara daring / zoom meeting yang dilaksanakan tanggal 24 Agustus s/d 02 September 2021 dan secara luring/klasikal yang dilaksanakan tanggal 06 s/d 08 September 2021 di Hotel V Kota Jambi
		7 SUROTO, SKM NIP.19740201 199702 1 001	Perawat Mahir PKM INAP Purwodadi	Diklat Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM) Jenjang Ahli di Hotel V Kota Jambi.	pembelajaran secara daring / zoom meeting yang dilaksanakan tanggal 24 Agustus s/d 02 September 2021 dan secara luring/klasikal yang dilaksanakan tanggal 06 s/d 08 September 2021 di Hotel V Kota Jambi
		8 ARDO NURTA, SKM NIP.19901010 201101 1 002	Perawat Terampil PKM INAP Purwodadi	Diklat Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM) Jenjang Ahli di Hotel V Kota Jambi.	pembelajaran secara daring / zoom meeting yang dilaksanakan tanggal 24 Agustus s/d 02 September 2021 dan secara luring/klasikal yang dilaksanakan tanggal 06 s/d 08 September 2021 di Hotel V Kota Jambi

		9	NIKO SATYA RAHARJO, SKM NIP.19890618 201502 1 001	Calon Penyuluh Kesmas PKM Lubuk Kambang	Diklat Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM) Jenjang Ahli di Hotel V Kota Jambi.	pembelajaran secara daring / zoom meeting yang dilaksanakan tanggal 24 Agustus s/d 02 September 2021 dan secara luring/klasikal yang dilaksanakan tanggal 06 s/d 08 September 2021 di Hotel V Kota Jambi
		10	JANGCIK, SKM NIP.19800621 200904 1 004	Penyuluh Kesehatan Masyarakat PKM RAWAT INAP SUBAN	Diklat Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM) Jenjang Ahli di Hotel V Kota Jambi.	pembelajaran secara daring / zoom meeting yang dilaksanakan tanggal 24 Agustus s/d 02 September 2021 dan secara luring/klasikal yang dilaksanakan tanggal 06 s/d 08 September 2021 di Hotel V Kota Jambi
3	DINAS PENDIDIKAN	11	TRI RAHAYU YUNIATI	Guru TK	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		12	SUTIYAH S.Pd	Guru TK	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		13	MUHAMMAD RAJULI	Guru SMP	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		14	KRISTIANTI	Guru SMP	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		15	BUDI TEGUH HARIANTO NIP.198310112015021001	Guru SMP	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		16	NANANG ARINTA	Guru SMP	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		17	IDARYANI NIP. 199101012020122025	Guru SMP	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		18	TUTI ASIAH NIP.198703112019032001	Guru SMP	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		19	SITI AISYAH	Guru SMP	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		20	YOPPY NOPIARDI	Guru SMP	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		21	SYAHDONA PUTRA	Guru SMP	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		22	SUDARTI	Guru SMP	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021

		23	FATMASARI NIP.198403312008042001	Guru SMP	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		24	SITI MAIMUNAH NIP.198303082011012006	Guru SMP	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		25	HERA WATI NIP.198311282009042005	Guru SMP	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		26	SRIYONO NIP.196811252021211001	Guru SMP	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		27	SARIFAH AINI NIP.198205202009042002	Guru SMP	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		28	ADE PUTRI HARMAN, S.PD NIP.198612022011012003	Guru SMP	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		29	DECO HERMAN NIP.198701282020121002	Guru SD	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		30	NASARUDIN NIP.199010092020121007	Guru SD	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		31	MIFTAH UDIN NIP.198208102014081001	Guru SD	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		32	RENOVA BR SIMBOLON	Guru SD	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		33	YUSMIATI NIP.19870127 201001 2 016	Guru SD	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		34	EVY NURDIANINGSIH NIP.197201272014082001	Guru SD	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		35	ABD. RAZAK NIP.197905102014081003	Guru SD	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		36	ABDUL HADI NIP.19811001 201502 1 001	Guru SD	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		37	ARDIANSYAH NIP.197712132009041002	Guru SD	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		38	SUKO SULASONO	Guru SD	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		39	BAYANGTA KELIAT NIP.198709242015021001	Guru SD	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021

		40	WIDYA MANDASARI NIP.198706222019032001	Guru SD	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		41	SUSI SUSANTI	Guru SD	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		42	KURNIATI NIP.198709292019032001	Guru SD	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		43	WELLI EKA SARI,S.PD	Guru SD	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		44	WIWIT FEBRIANTI NIP.198802282020122007	Guru SD	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		45	NURSINTA DEWI PURBA	Guru SD	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		46	HENI LESTARI	Guru SD	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		47	SITI HALIMAH	Guru SD	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		48	FERRY SETIADI	Guru SD	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		49	HAMIDAH	Guru SD	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		50	SRI WULAN SITI MASITOH	Guru SD	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		51	MELI ANITA, A.	Guru SD	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021
		52	MUHAMMAD ZAINI NIP.196706051993031006	Guru SD	Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021	Tahun 2021

Sumber Data Bid. Pengembangan Kompetensi Aparatur

Dengan demikian, total pegawai yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan formal sampai dengan tahun 2020 sebanyak 798 orang dan telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.

C. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal pada Indikator ini merupakan jumlah Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti Diklat Non Formal pada tahun 2021, dengan capaian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Analisis Capaian IKU

No	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Capaian s/d Tahun 2020	Realisasi Capaian s/d Tahun 2021		Jumlah
			Target	Realisasi	
I	2	3	4	5	6
Persentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal					
I	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	201 Org	40 Org	168 Org	369 Org
Formulasi: $\left[\frac{\text{Jumlah Aparatur yang telah mengikuti diklat Non formal}}{\text{Jumlah Total Aparatur}} \right] \times 100$					$\frac{369}{3862} \times 100 = 9,6\%$

Sampai dengan tahun 2021 total aparatur yang mengikuti diklat Non formal sebanyak 369 orang atau bertambah 168 orang dibanding tahun sebelumnya, sedangkan jumlah pegawai Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan Tahun 2021 ini sebanyak 3862 orang, sehingga persentase aparatur yang mengikuti diklat Non formal ditargetkan sebesar 5,9% dengan realisasinya pada tahun 2021 sebesar 9,6% atau mengalami kenaikan sebesar 162%.

Tabel 3.6
Data Pendukung Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

No	OPD / SKPD	NAMA / NIP	JABATAN	DIKLAT, BIMTEK, WORKSHOP YANG DIIKUTI	Keterangan
I	2	3	4	5	6
1	SEKRETARIS DAERAH				
1	Bagian Kesra dan Keagamaan	1 M. YUSUF, S.Sos NIP. 199000918 202012 1 004	Analisis Budaya Keagamaan	Kursus/Pelatihan Bahasa Inggris di Indonesia Brain Camp Palembang	21 (Dua Puluh Satu Hari) terhitung mulai tanggal 21 Juni s/d 11 Juli 2021.
2	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Tanjung Barat	2 HANNISA, S.Sos NIP. 19960917 202012 2 016	Pranata Humas Ahli Pertama	Kursus/Pelatihan Bahasa Inggris di Indonesia Brain Camp Palembang	21 (Dua Puluh Satu Hari) terhitung mulai tanggal 21 Juni s/d 11 Juli 2021.
2	Sekretariat DPRD	3 M. RAFSANJANI PUTRA, SH NIP.19960227 201903 1 003	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli	Kursus/Pelatihan Bahasa Inggris di Indonesia Brain Camp Palembang	21 (Dua Puluh Satu Hari) terhitung mulai tanggal 21 Juni s/d 11 Juli 2021.

			Pertama		
3	RSUD DAUD ARIF	4 dr. Hj. Zaimah Hilal, SpM, MKM NIP.19641005 200112 2 001	dr. Spesialis Mata	kegiatan Pelatihan Operasi /Bedah Katarak Modern (PHACOEMULSI FIKASI) oleh Dokter Spesialis Mata pada RSUD KH.Daud Arif Kab. Tanjab Barat.	tanggal 12 Juli s/d 04 September 2021
4	BAPPEDA	5 JOSUA KINGSLEY SITORUS, S.Pn NIP.19940805 201903 1 002	Pemeriksa Pajak Ahli Pertama	Kursus/Pelatihan Bahasa Inggris di Indonesia Brain Camp Palembang	21 (Dua Puluh Satu Hari) terhitung mulai tanggal 21 Juni s/d 11 Juli 2021.
		6 FITRIANI WULAN SARI, S.AP NIP. 19850626 201101 2 008	Analisis Layanan Umum	Diklat Manajemen Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021	BPSDM Kemendagri Jakarta 05 s/06 Oktober 2021 Online dan 12 s/d 14 Oktober 2021 Secara Onclass
5	BKPSDM	7 MUHAMMAD SALIM, S.Sos NIP.19630725 198603 1 007	Sekretaris	Kursus/Pelatihan Bahasa Inggris di Indonesia Brain Camp Palembang	21 (Dua Puluh Satu Hari) terhitung mulai tanggal 21 Juni s/d 11 Juli 2021.
		8 AMELIA JOVIANI, S.Kom NIP. 19920123 201903 2 003	Pranata Komputer Ahli Pertama	Kursus/Pelatihan Bahasa Inggris di Indonesia Brain Camp Palembang	21 (Dua Puluh Satu Hari) terhitung mulai tanggal 21 Juni s/d 11 Juli 2021.
		9 FAHMI ASKA, S.AP NIP.19770722 201001 1 006	Pelaksana Pengelola Data dan Informasi Kepegawaian	Diklat Manajemen Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021	BPSDM Kemendagri Jakarta 05 s/06 Oktober 2021 Online dan 12 s/d 14 Oktober 2021 Secara Onclass
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	10 MARTHA CAROLINA, S.Pd NIP. 19940305 202012 2 010	SMPN 1 Pengabuan	Kursus/Pelatihan Bahasa Inggris di Indonesia Brain Camp Palembang	21 (Dua Puluh Satu Hari) terhitung mulai tanggal 21 Juni s/d 11 Juli 2021.
		11 DIANA FITRI, S.S NIP. 19800829 200804 2 001	SMPN 2 Betara	Kursus/Pelatihan Bahasa Inggris di Indonesia Brain Camp Palembang	21 (Dua Puluh Satu Hari) terhitung mulai tanggal 21 Juni s/d 11 Juli 2021.
		12 EMA SUSANTI, S.Pd.I NIP. 19800127 201001 2 014	SMPN 6 Merlung	Kursus/Pelatihan Bahasa Inggris di Indonesia Brain Camp Palembang	21 (Dua Puluh Satu Hari) terhitung mulai tanggal 21 Juni s/d 11 Juli 2021.

		13	LINDA PURNAMASARI NIP. 19960814 202012 2 005	SMPN 8 Merlung	Kursus/Pelatihan Bahasa Inggris di Indonesia Brain Camp Palembang	21 (Dua Puluh Satu Hari) terhitung mulai tanggal 21 Juni s/d 11 Juli 2021.
		14	ADNU SUARDI NIP. 19831130 200904 1 001	SMPN Satu Atap I Tungkal Ilir	Kursus/Pelatihan Bahasa Inggris di Indonesia Brain Camp Palembang	21 (Dua Puluh Satu Hari) terhitung mulai tanggal 21 Juni s/d 11 Juli 2021.
		15	ROBI TRI WAHYUDI, S.Pd NIP. 19910619 202012 1 004	SMPN 2 Pengabuan	Kursus/Pelatihan Bahasa Inggris di Indonesia Brain Camp Palembang	21 (Dua Puluh Satu Hari) terhitung mulai tanggal 21 Juni s/d 11 Juli 2021.
		16	M. UBAIDILLAH AMARI, S.Pd NIP. 19970720 202012 1 005	SMPN Satu Atap I Pengabuan	Kursus/Pelatihan Bahasa Inggris di Indonesia Brain Camp Palembang	21 (Dua Puluh Satu Hari) terhitung mulai tanggal 21 Juni s/d 11 Juli 2021.
		17	FEBI YULIANTI, S.Pd NIP. 19890201 202012 2 003	SMPN 10 Merlung	Kursus/Pelatihan Bahasa Inggris di Indonesia Brain Camp Palembang	21 (Dua Puluh Satu Hari) terhitung mulai tanggal 21 Juni s/d 11 Juli 2021.
		18	ABDUL MANAN, S.Pd NIP. 19710512 200701 1 039	SMPN 2 Kuala Tungkal	Kursus/Pelatihan Bahasa Inggris di Indonesia Brain Camp Palembang	21 (Dua Puluh Satu Hari) terhitung mulai tanggal 21 Juni s/d 11 Juli 2021.
		19	FARIDA NURAINI, S.Pd NIP. 19891224 202012 2 009	SMPN 10 Tungkal Ulu	Kursus/Pelatihan Bahasa Inggris di Indonesia Brain Camp Palembang	21 (Dua Puluh Satu Hari) terhitung mulai tanggal 21 Juni s/d 11 Juli 2021.
		20	AMRIAL, S.Pd NIP.19680506 199512 1 002	Plt Kasubag PEPP	Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pendidikan Tingkat Dasar	LPMP Lampung tanggal 06 s.d 12 Desember 2021
		21	HENDRA,S.Pd.SD NIP.19800417200 9041002	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		22	RADEN AHMAD SARNUBI, S.Pd.SD NIP.19760904199 7031002	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		23	Ahmad Sumadi Driantama, S.Pd NIP.19840423201 9031001	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021

		24	SITI PITRIANI,S.Pd.SD NIP.19860707200 7012004	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		25	BOHARI MUSLIM, S.Pd.SD NIP.BOHARI MUSLIM, S.Pd.SD	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		26	SAHID AGUS NURHAMID.MPd NIP.19861210200 9041003	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		27	SUPADI, S.Pd.SD NIP.19730806199 7031005	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		28	Yansari, S.Pd.SD NIP.19720205199 7031007	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		29	Munjairoh, S.Pd. NIP.19700805199 3032002	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		30	RIKA NURUL. APRIYANTI, S.Pd	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		31	ROIHANA MUSTIKA RATRI,S.Pd NIP.19960906201 9032001	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		32	Camelia, S.Pd	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		33	TIKA PUJI RAHAYU, S.Pd. SD NIP.19830918201 0012018	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		34	SITI HAMISAH,A.Ma NIP.19840509 200701 2004	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		35	KAMISAH,S.Pd.SD NIP.19700707199 6032002	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		36	MUHAMMAD WARDI,SPd NIP.19750217200 7011003	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		37	SARNUZI, S.Pd NIP.19670414198 9011001	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021

		38	LISMAWATI,S.Pd. SD NIP.19700703199 2042001	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		39	RUDIANTO,SPd.S D NIP.19870310201 5021001	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		40	NURIZA,S.Pd NIP.19820926201 4082001	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		41	Muryanti, S.Pd.SD NIP.19720611200 7012025	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		42	AGUS WAGIO, S.Pd.SD NIP.19770807201 1011003	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		43	ISKANDAR, S.Pd.SD NIP.19810127200 7011007	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		44	KOMSATI,S.Pd NIP.19710315200 6042002	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		45	ABDUL WAHAB NIP.19780715201 4081003	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		46	SELAMAT,A,Ma NIP.19770419200 7041018	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		47	SITI HILMIYAH, S.Ag NIP.19750903201 0012012	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		48	Sartika Br Ginting, S.Pd	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		49	NURSAADAH,S.P d.SD NIP.19731124200 5012004	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		50	Agus Kamarudin,S.Pd	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		51	Zaidin, S.Pd	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021

		52 Nahari, S.Pd	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		53 Syafrida,S.Pd.SD NIP.19751008199 9092001	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		54 Mahrus, S.Pd.SD NIP.19681222200 6041010	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		55 KISWANTO, S.Pd,SD NIP.19840307200 9041004	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		56 Alas Mendri, S.Pd.SD NIP.19701231199 3032015	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		57 Nurlatifah, S.Pd.I NIP.19800413200 7012013	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		58 Yuningsih Wulandari, S.Pd.I	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		59 Nurmala, S.Pd.SD NIP.19850515 201903 2 001	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		60 JUNAIDI,S.Pd NIP.19790820200 7011013	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		61 ARLI, S.Pd NIP.19720805199 5021001	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		62 SABAR NIP.19650102199 3031008	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		63 Supriyanto, S.Pd.SD NIP.19700623199 2031001	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		64 FITRIYANTIS,Pd. SD NIP.19811108201 0012015	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		65 SUTRISNO, S.Pd.SD NIP.19690211199 0071001	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021

		66	Siti Hadijah,A.Ma.Pd NIP.198508162007012002	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		67	NENG YUNARSIH,S.Pd NIP.197210111998032007	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		68	MARYUNAH, S.Pd. SD NIP.197108082005012000	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		69	SRE REZEKI,S.Pd.SD NIP.198503112010012013	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		70	Ahmad Muhsin, S.Pd.SD NIP.197406071998112001	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		71	Abdul Waris,S.Pd SD NIP.198001042014081002	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		72	NOVITA ASRIANTI , A.Ma NIP.198211012005012011	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		73	Sudiman, S.Pd NIP.197503052007011040	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		74	Siti Rohani, S.Pd NIP.198207162007012012	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		75	YUSMIATI S.Pd.SD NIP.198701272010012016	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		76	Fatimah	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		77	Marsides, S.Pd.SD NIP.197407121997031001	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		78	Kadim.A.Ma NIP.197307202007011011	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		79	Maya Wulandari	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021

		80	Maidi, S.Pd.SD NIP.19780519200 5011010	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		81	Tuniah Hastuti, S.Pd.SD NIP.19690909200 6042017	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		82	Enny Gusliantini, S.Pd.SD NIP.19860824200 7012001	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		83	Hasneri, S.Pd NIP.19700331200 5012004	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		84	Hanafi Fani, S.Pd NIP.19851123 201502 1 001	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		85	Rapika Sari	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		86	Tri Julisiani, S.Pd.SD NIP.19730703199 7032002	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		87	Nurlaili, S.Pd.SD NIP.19700220199 4062001	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		88	Khoiriyah, S.Pd NIP.19750325200 7012020	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		89	Siti Masnah NIP.19700707200 5012008	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		90	Siti Alijah, S.Pd NIP.19860305200 9042000	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		91	Asnidar, S.Pd NIP.19710501200 0092001	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		92	Yulia Hastuti, S.Pd NIP.19630712 198901 2 001	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		93	Evy Nurdianingsih, S.Pd.SD NIP.19720127201 4082001	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021

		94	Rismalasari, S.Pd.SD NIP.19831012201 1012009	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		95	Desti Eka Fitri, S.Pd.SD NIP.19840410201 1012006	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		96	Rohminatun, S.Pd NIP.19670418 200604 2 008	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		97	Zeis Vario Antriono Pradana	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		98	Wiidaniah, S.Pd NIP.19780401200 7012006	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		99	Syamsul Rizal	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		100	Wellianti, S.Pd.SD NIP.19680705200 6042008	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		101	Fandi Suandra	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		102	Siti Patimah,S.Pd NIP.19650804200 6042008	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		103	Dedi Juhara, S.Pd.SD NIP.19670112 198901 1 002	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		104	Hikmatul Mizanah,S. Pd. Sd NIP.19960701201 9032001	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		105	Wasna Minarni,A.Ma.Pd NIP.19780518201 0012004	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		106	Miftahudin, S.Pd.SD NIP.19820810201 4081001	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		107	Jamaluddin,S.Pd.SD NIP.19660613198 6101001	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021

		108 Siti Zulbaidah, S.Pd NIP.19720428200 6042002	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		109 ERNIATI	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		110 Adi Aspandi, S.Pd NIP.19820908200 5011002	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		111 Sulastri, S.Pd NIP.19661219200 6042003	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		112 Hendri, S.Pd NIP.19661231198 6111043	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		113 M. Ibrahim, A.Ma.Pd NIP.19650412198 6101009	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		114 Hartati, S.Pd.SD NIP.19680621199 4062001	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		115 Atriyanti, S.Pd.SD NIP.19701016200 5012001	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		116 ENI ZURDIANA NIP.19760505201 0012011	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		117 Zulkifli NIP.19850628 2011011004	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		118 Ita Muryani	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		119 Ummatun Naf'ah	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		120 Marhana NIP.19720305199 4032006	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		121 Rosdiah, S.Pd NIP.19680817200 5012007	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021

		122	Rudhiah,S.Pd.SD NIP.19680218200 5012003	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		123	Ricca Rahmani NIP.19870117 201005 1 001	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		124	Hasdiana, S.Pd.SD NIP.19661231198 9012012	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		125	Yenni Martha Sari	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		126	Muhammad Yasin, S.Pd	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		127	Asjudettra,S.Pd.SD NIP.19851206200 9041002	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		128	Rahimah, S.Pd NIP.19720305200 7012004	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		129	Darmawan, S.Pd	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		130	Sani, S.Pd NIP.19770620 200701 1 021	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		131	Jawahir Tanthawi Azmi, S.Pd NIP.19851213 202012 1 006	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		132	Munaimah NIP.19650527200 7012004	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021

		133	Khairunnisa	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		134	Siti Markonah,S.Pd.SD NIP.198104042005012016	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		135	Nurbaiti,A.Ma.Pd NIP.196801012005012008	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		136	Eko Putra NIP.198410182007011004	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		137	Sumedi, S. Pd. SD. NIP.197001011994061001	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		138	Miswandi, S.Pd NIP.197005081994011001	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		139	Sahrul	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		140	Ahmad Ansori	Guru SD	Diklat Wawasan Kebangsaan Kelas Tinggi Tahun 2021	Tahun 2021
		141	SINTA SITI HASANAH NIP.198107292009042006	Guru SD	Diklat Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2021	Tahun 2021
		142	NURGAYAH NIP.198311012011012003	Guru SD	Diklat Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2021	Tahun 2021
		143	MUNAWIR NIP.198201122010011018	Guru SD	Diklat Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2021	Tahun 2021
		144	M.HALILILLAH, S.Pd.I NIP.198606062019031001	Guru SD	Diklat Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2021	Tahun 2021
		145	JAM'AH NIP.198202102009042008	Guru SD	Diklat Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2021	Tahun 2021
		146	IBADUL MUSTOFA NIP.198704152010011008	Guru SD	Diklat Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2021	Tahun 2021

		147	HARYUNI NIP.19820812 200701 2 001	Guru SD	Diklat Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2021	Tahun 2021
		148	HARDIANSYAH NIP.19820826 200904 1 002	Guru SD	Diklat Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2021	Tahun 2021
		149	ASNAWI AMSAR, S.PdI	Guru SD	Diklat Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2021	Tahun 2021
		150	ARIF HIDAYAT NIP.19850525 201502 1 001	Guru SD	Diklat Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2021	Tahun 2021
		151	MARIYAH NIP.19820703 200904 2 002	Guru SMP	Diklat Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2021	Tahun 2021
		152	FERRY ANGGRIAWAN NIP.19841204 201001 1 014	Guru SMP	Diklat Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2021	Tahun 2021
		153	Ir. Heni Purnamawati, M.Pd.I NIP.19700323 200501 2 006	Guru SMP	Diklat Pengelola Laboratorium / Bengkel Sekolah Tahun 2021	Tahun 2021
		154	Winda Sari, S.Pd NIP.19910521 201903 2 002	Guru SMP	Diklat Pengelola Laboratorium / Bengkel Sekolah Tahun 2021	Tahun 2021
7	DINAS KESEHATAN	155	AHMAD FUAD, S.Kep,M.Si NIP. 19720419 199203 1 002	Kasi Pelayanan Jaminan Kesehatan	Pelatihan Manajemen Terapan bagi Pengelola Program Kesehatan (Applied Management Training Course/AMTC) di BBPK Ciloto.	di BBPK Ciloto. 25 s/d 28 Oktober 2021
		156	DINA ELISABET BUTAR BUTAR, SKM,MKKK NIP.19830328 200804 2 001	Pelaksana dan Pengelola Program Seksi Primer, Mutu dan Tradisional Bidang Pelayanan Kesehatan	Pelatihan Manajemen Terapan bagi Pengelola Program Kesehatan (Applied Management Training Course/AMTC) di BBPK Ciloto.	di BBPK Ciloto. 25 s/d 28 Oktober 2021

8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	157	MEYRINA EKA PUTRI, S.Si NIP.19860512 201001 2 021	Kabid Tata Lingkungan Hidup	Pendidikan dan Pelatihan Analisis Mengenai Dampak Amdal yang dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 26 Nopember 2021 secara Daring/online	15 s/d 26 Nopember 2021
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	158	AIDHI ZULHAM, S.A.P NIP.19811004 201001 1 005	Pelaksana Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Diklat Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2021.	tanggal 25 s.d 29 Oktober 2021, selama 5 (lima) hari di Hotel Harper Jl. Biru Laut X No. 12 Cawang Jakarta Timur
10	DINAS KOPRASSI USAHA KECIL, MENENGAH PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN	159	GUSTON TAMPUBOLON, A.Md NIP.19830830 201001 1 010	Pelaksana Pengelola Fasilitasi dan Mediasi Pembangunan Usaha Perdagangan Ekspor	Kursus/Pelatihan Bahasa Inggris di Indonesia Brain Camp Palembang	21 (Dua Puluh Satu Hari) terhitung mulai tanggal 21 Juni s/d 11 Juli 2021.
11	DINAS TENAGA KERJA	160	ERMAWATI, S.Sos NIP.19760809 199802 2 001	Kasi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kursus/Pelatihan Bahasa Inggris di Indonesia Brain Camp Palembang	21 (Dua Puluh Satu Hari) terhitung mulai tanggal 21 Juni s/d 11 Juli 2021.
12	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA (DISPARPORA)	161	RENGGA SEKARSARI, S.IP NIP.19800830 201001 2 012	Kasi Pengembangan Destinasi	Kursus/Pelatihan Bahasa Inggris di Indonesia Brain Camp Palembang	21 (Dua Puluh Satu Hari) terhitung mulai tanggal 21 Juni s/d 11 Juli 2021.
		162	NIAH, SE NIP.19820324 201001 2 007	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program	Diklat Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2021.	tanggal 25 s.d 29 Oktober 2021, selama 5 (lima) hari di Hotel Harper Jl. Biru Laut X No. 12 Cawang Jakarta Timur
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	163	REGINA DWI CAHYANI, ST NIP. 19970601 202012 2 015	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	Diklat Laboratorium Tanah	
14	DINAS TENAGA KERJA	164	HENNY FADILLAH, S.AP NIP 197600504 200801 2 006	Pengantar Kerja Pertama	Pembekalan Diklat Teknis Analisis Jabatan	Kementerian Ketenagakerjaan RI 07 s/d 11 September 2021

15	BAPPEDA	165	ASMARA DIAN PUTRA, ST NIP. 19850731 201001 1 016	Kasubbid Infrastruktur	Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambidan Kab. Kota Se-Provinsi Jambi Tahun 2021	BPSDM Provinsi Jambi 07 s/d 12 Juni 2021
16	DINAS PERIKANAN	166	Fajar Muda Kurniawan S.Tr,pi NIP. 19940406 201903 1 001	Kasi Penangkapan Ikan	Peningkatan sumber daya Manusia bidang Giographic Information System (GIS)	DKP Prov Jambi 5 s/d 7 April 2021
17	KECAMATAN BETARA	167	TONI ERMAWAN P, S.STP, M.Si NIP.19770807 199612 1 001	Camat Betara	Diklat Kepamongprajaan bagi Camat Angkatan III dan IV (PNBP)	Diklat Kepamongprajaan bagi Camat Angkatan III dan IV (PNBP)
18	KECAMATAN MUARA PAPALIK	168	JOAN PRAYUDA, SE. MM NIP.19810829 201001 1 010	Camat Muara Papalik	Diklat Kepamongprajaan bagi Camat Angkatan III dan IV (PNBP)	Diklat Kepamongprajaan bagi Camat Angkatan III dan IV (PNBP)

Sumber Data Bid. Pengembangan Kompetensi Aparatur

SASARAN STRATEGIS II

Meningkatnya Penataan dan Kinerja Aparatur

Sumber Daya Manusia merupakan aset utama dan terpenting dalam suatu organisasi dan pemerintahan, Pengelolaan SDM harus dilakukan secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kemampuan SDM dengan kebutuhan Organisasi. keseimbangan tersebut merupakan kunci utama organisasi agar dapat berkembang secara produktif.

Dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, profesionalisme ASN sangatlah diperlukan untuk dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Profesionalisme ASN tersebut sangat terkait dengan penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas jabatan dalam sebuah organisasi birokrasi. Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian suatu kompetensi Aparatur Sipil Negara pada suatu jenis dan jenjang tertentu, Tujuan diselenggarakannya uji kompetensi yaitu: *Pertama* untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Aparatur Sipil Negara berupa pengetahuan, Keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan. sehingga Aparatur Sipil Negara tersebut dapat bertanggung jawab dalam menjalankan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efisien. *Kedua* yaitu memberikan pedoman bagi pejabat pembina kepegawaian dalam rangka pembinaan dan Pengembangan karier

Aparatur Sipil Negara, dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan kelancaran penyelenggaraan tugas pembangunan, dibutuhkan sosok Aparatur Sipil Negara yang profesional.

Profesionalitas seorang Aparatur Sipil Negara yang ditampilkan melalui kemampuan melayani masyarakat dengan cepat dan berkualitas, akan menentukan hasil dari pembangunan yang dilaksanakan sehingga profesionalitas menjadi salah satu pertimbangan penting dalam rangkaian proses evaluasi dan penempatan Aparatur Sipil Negara. Peningkatan prestasi kerja dan profesionalisme ASN dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mencapai pelayanan yang prima kepada masyarakat, sehingga uji kompetensi dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja. Adapun analisis terhadap capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ke II adalah sebagai berikut:

A. Persentase Penetapan Jabatan sesuai Kompetensi

Persentase penetapan jabatan sesuai kompetensi pada indikator ini merupakan jumlah pejabat struktural yang terisi tahun 2021, dengan capaian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7
Analisis Capaian IKU

No	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Capaian s/d Tahun 2020	Realisasi Capaian s/d Tahun 2021		Jumlah Jabatan Struktural Tahun 2021
			Target	Realisasi	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Persentase penetapan jabatan sesuai kompetensi					
I	Jumlah pejabat struktural yang terisi	749	753	488	600
Formulasi: $\frac{\text{Jumlah Pejabat Struktural yang Terisi}}{\text{Jumlah Jabatan Struktural}} \times 100$					$\frac{488}{600} \times 100 = 81,5\%$

Pada tahun 2021 jumlah pejabat struktural yang terisi sebanyak 488 pejabat dengan jumlah jabatan struktural sebanyak 600 jabatan atau berkurang 219 jabatan pada tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya penyederhanaan birokrasi pada penyetaraan dari jabatan eselon IV ke fungsional sehingga persentase penetapan jabatan sesuai kompetensi yang ditargetkan sebesar 92% dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar 81,5%.

Dengan demikian indikator kinerja utama persentase penetapan jabatan sesuai kompetensi pada tahun 2021 belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan, hal ini

dikarenakan adanya aturan dalam masa 6 bulan setelah Bupati dilantik izin seleksi terbuka JPT Pratama Pemkab Tanjung Barat harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri, terkait hal tersebut pengisian JPT Pratama Pemkab Tanjung Barat tidak mendapatkan rekomendasi dari KASN sedangkan pengisian jabatan eselon III dan IV masih pada tahap proses penilaian kompetensi untuk menduduki jabatan yang kosong.

Tabel. 3.8
Data Pendukung Pejabat Struktural

No	Uraian	Jabatan Terisi	Jabatan Tidak Terisi	Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Eselon II	29	8	37
2.	Eselon III	167	3	170
3.	Eselon IV	292	101	393
Total				600

Sumber Data: Bidang Mutasi

B. Rasio Pejabat Fungsional Tertentu

Rasio pejabat fungsional tertentu pada indikator ini merupakan jumlah pejabat fungsional tertentu tahun 2021, dengan capaian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9
Analisis Capaian IKU

No	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Capaian s/d Tahun 2020	Realisasi Capaian s/d Tahun 2021		JUMLAH
			Target	Realisasi	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Rasio Pejabat Fungsional Tertentu					
I	Jumlah pejabat Fungsional tertentu	2065	106	282	2347
Formulasi: $\frac{\text{Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu}}{\text{Jumlah PNS}} \times 100$					$\frac{2347}{3862} \times 100 = 60,8\%$

Sampai dengan tahun 2021 total pejabat fungsional sebanyak 2347 orang atau bertambah 282 orang dibanding tahun sebelumnya, sedangkan jumlah pegawai Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan Tahun 2021 ini sebanyak 3862 orang. sehingga capaian rasio pejabat fungsional tertentu yang ditargetkan sebesar 53,9% tahun 2021 dengan realisasi sebesar 60,8% atau mengalami kenaikan sebesar 113%.

Tabel 3.I0
Data Pendukung Pejabat Fungsional Tertentu

No	URAIAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Guru	1416
2	Pengawas	9
3	Pamong Belajar	3
4	Kesehatan	617
5	Penyuluh	46
6	POL PP	11
7	Auditor	15
8	Auditor Kepegawaian	2
9	Analisis Kepegawaian	2
10	Pengantar Kerja	1
11	Penyuluh Sosial	1
12	Penera	1
13	Perancang Undang-Undang	2
14	Instruktur	1
15	Administrasi Kesehatan	1
16	Penyetaraan Jabatan Eselon IV ke Fungsional	219
Total		2347

Sumber Data: Bidang Mutasi

C. Tingkat Penurunan Pelanggaran Disiplin

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, maka Badan Kepegawaian Daerah sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan pegawai, berorientasi pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan

dan kesadaran PNS terhadap peraturan disiplin dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan pelaksanaan pemerintahan yang baik melalui penurunan jumlah kasus pelanggaran disiplin.

Tabel 3.11
Analisis Capaian IKU

No	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Capaian s/d Tahun 2020	Realisasi Capaian s/d Tahun 2021		Jumlah
			Target	Realisasi	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Tingkat Penurunan Pelanggaran Disiplin PNS					
I	Jumlah pelanggaran disiplin	8 Org	5 Org	5 Org	5 Org
Formulasi: $\frac{\text{Jumlah pelanggaran disiplin tahun lalu} - \text{jumlah pelanggaran disiplin tahun berjalan}}{\text{Jumlah pelanggaran disiplin tahun lalu}} \times 100$					$\frac{8-5}{8} \times 100 = 37,5\%$

Dengan demikian capaian indikator tingkat penurunan pelanggaran disiplin ASN pada tahun 2021 sebesar 37,5%. Adapun jumlah kasus pelanggaran disiplin pada tahun ini sebanyak 5 kasus atau lebih kecil dibanding tahun sebelumnya yaitu sebanyak 8 kasus, data penjatuhan hukuman disiplin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.12
Data Pendukung Pelanggaran Disiplin

No	Nama	Dasar Pemberhentian	No. SK Pemberhentian
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Joko Rezekianto, A.Md NIP. 19830814 200604 1 002	PP. No. 11 Tahun 2017	479/ Kep.Bup/ BKPSDM/ 2020 tanggal 14 Juli 2020
2.	Yudha Andrians NIP. 19831127 201001 1 007	PP No. 11 Tahun 2017	340/Kep.Bup/BKPSDM/ 2021 tanggal 7 Mei 2021
3.	Suyadi NIP. 19680806 199203 1 011	PP 53 Tahun 2010	459/Kep.Bup/BKPSDM/2021 tanggal 21 Juli 2021
4.	dr. Bobby Pardomuan Sitompul NIP. 19860824 201503 1 002	PP No. 11 Tahun 2017	469/Kep.Bup/BKPSDM/2021 tanggal 26 Juli 2021
5.	Muhammad Berliansyah, A.Md NIP. 19801201 201001 1 004	PP No. 11 Tahun 2017	487/Kep.Bup/BKPSDM/2021 tanggal 9 Agustus 2021

Sumber Data: Bidang PSIK

3.2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Pada pengukuran perbandingan realisasi ini dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir pada masing-masing perspektif dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 3.I3
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 s/d TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI TAHUN KE-									
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
			2020		2021		2022		2023		2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Meningkatnya Kualiatas dan Profesionalisme ASN	Indeks Profesional ASN	59	59	65	48,9						
		Persentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)	6,6	6,6	7,3	8,2						
		Persentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal (%)	5	5	5,9	9,6						
2	Meningkatnya Penataan dan Kinerja ASN	Persentase Penetapan Jabatan sesuai Kompetensi (%)	91,6	91,6	92	81,5						
		Rasio Pejabat Fungsional Tertentu (%)	51,4	51,4	53,9	60,8						
		Tingkat Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN (%)	25	25	25	37,5						

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2020 s/d tahun 2021 yang terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari keseluruhan indikator tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat peningkatan realisasi kinerja atau capaian kinerja setiap tahunnya dari beberapa indikator kinerja.

3.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Pada perbandingan ini akan menggambarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra dan disajikan pada tabel dibawah ini:

TABEL 3.14
REALISASI KINERJA
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BKPSDM

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI TAHUN KE-											
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R		
				2021		2022		2023		2024		2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I	Terwujudnya ASN yang Profesional, Kompeten dan Kompetitif	Meningkatnya Kualiatas dan Profesionalisme ASN	Indeks Profesional ASN	65	48,9										
			Persentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)	7,3	8,2										
			Persentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal (%)	5,9	9,6										
		Meningkatnya Penataan dan Kinerja ASN	Persentase Penetapan Jabatan sesuai Kompetensi (%)	92	81,5										
			Rasio Pejabat Fungsional Tertentu (%)	53,9	60,8										
			Tingkat Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN (%)	25	37,5										

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi kinerja jangka menengah pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari keseluruhan indikator tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 4 indikator yang telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 2 indikator yg belum memenuhi target yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2021.

3.4. CAPAIAN RENCANA STRATEGIS PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2021

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada awal tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Tahun ke-														
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		2021		2021												
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme ASN Meningkatnya Penataan dan Kinerja Aparatur	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN (%)	59	77	65	68	71	73	75	77	48,9															75%					
			Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)	6.6	12	7.3	8.2	9.2	10.3	11.6	12	8.2																		112%		
			Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal (%)	5	12.2	5.9	7.1	8.4	9.7	11.2	12.2	9.6																			162%	
			Persentase Penetapan Jabatan sesuai kompetensi (%)	91.6	93	92	92	92	92	93	93	81.5																			89%	
			Rasio Pejabat Fungsional Tertentu (%)	51.4	61	53,9	55,9	56,3	56,7	56,9	61	60,8																			113%	
			Tingkat Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN (%)	50	50	25	25	25	25	25	50	37,5																			150%	
	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Bezzetting/Formasi yang diusulkan (Formasi)	500	3000	500	65.399.774	535.000.000	500	500	1.615.250.000	500	500	1.813.668.125	108.179.600															191%	161%		
																		%38														

	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Izin Perceraian yang di Proses (Berkas)	24	92	279.750.000			12	40.000.000	20	50.000.000	20	57.500.000	20	66.125.000	20	66.125.000																									
	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah berkas Tanda Jasa, Karis, Karsu, Karpeg dan pensiun yang diproses (Berkas)	586	2500	317.700.000			500	30.000.000	500	60.000.000	500	69.000.000	500	79.350.000	500	79.350.000																									
																										Rata-rata capaian kinerja (%)	118%															
																										Predikat kinerja	Sangat Tinggi															
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi yang intens dengan instansi terkait																																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterkaitan pengisian JPT Pratama Pemkab Tanjab Barat tidak mendapatkan rekomendasi dari KASN																																										
Usulan tindak lanjut pada RENSTRA Perangkat Daerah berikutnya *): Efektif berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan KASN																																										

3.5. ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN/ KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Secara umum sebagian besar rasio pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2021 ini dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, meskipun masih juga terdapat beberapa indikator yang belum mencapai 100%. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja secara umum terkategori memuaskan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal antara lain:

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya dalam dokumen perencanaan tahun 2021.
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan diharapkan dapat menghasilkan output dan outcome.
4. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan antara lain:

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari SKPD terkait dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan BKPSDM.
2. Adanya sinergitas program/kegiatan yang direncanakan dengan SKPD terkait seperti pelantikan pejabat fungsional, pengambilan sumpah PNS, pembinaan disiplin aparatur dan pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional serta diklat prajabatan gol II dan III.

Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab kegagalan dan alternative solusi yang telah dilakukan antara lain:

1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) aparatur, baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur BKPSDM.
3. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di SKPD untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
4. Indikator pada level output dan outcome pada BKPSDM umumnya bersifat fisik, sementara kegiatan yang dilaksanakan umumnya hanya dalam bentuk koordinasi, sehingga pencapaian pada level outcome kadang sulit tercapai.
5. Alokasi anggaran yang ditetapkan setelah melewati pembahasan di DPRD tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.
6. Adanya aturan dalam masa 6 bulan setelah Bupati dilantik izin seleksi terbuka JPT Pratama Pemkab Tanjab Barat harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri, terkait hal tersebut pengisian JPT Pratama Pemkab Tanjab Barat tidak mendapatkan rekomendasi dari KASN sedangkan pengisian jabatan eselon III dan IV masih pada tahap proses penilaian kompetensi untuk menduduki jabatan yang kosong.
7. Kurangnya peran serta PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk menyampaikan sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan ke BKPSDM untuk dilakukan penginputan pada aplikasi SAPK sebagai bagian dari penilaian indeks profesional ASN.

Alternative solusi yang telah dilakukan untuk mengantisipasi kegagalan pada pencapaian kinerja antara lain:

- I. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan secara periodik serta implementasi penilaian kinerja PNS melalui penerapan sasaran kinerja pegawai (SKP) dalam rangka pengimplementasian penganggaran berbasis kinerja.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dalam pengumpulan data capaian kinerja guna pengoptimalan ketersediaan data dalam pengambilan kebijakan.

Adapun rekomendasi yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi kegagalan pada pencapaian kinerja yang akan datang antara lain:

- I. Optimalkan koordinasi lebih intens dalam membangun hubungan kerjasama yang lebih baik dengan berbagai pihak yang ada di Kabupaten, terkait dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan dalam upaya mendapatkan data sertifikat peserta diklat agar dapat menunjang penilaian Indeks Profesional ASN.

2. Efektifkan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, KASN dan instansi terkait untuk pengisian JPT Pratama Pemkab Tanjab Barat.
3. Efektifkan berkoordinasi dengan Pembina Kepegawaian untuk mengisi jabatan eselon III dan IV yang kosong agar roda pemerintahan berjalan efektif.

3.6. ANALISIS ATAS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh BKPSDM antara lain:

1. Anggaran

Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2021 untuk pengembangan kompetensi aparatur sebesar 2,8 M akan tetapi dikarenakan kurangnya minat aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dimasa pandemi covid sehingga pengembangan kompetensi aparatur belum berjalan dengan efektif.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengalami penurunan setiap tahunnya akibat banyaknya pegawai yang pindah tugas atau mutasi ke SKPD lain, sementara dilain sisi pegawai yang pindah tugas atau mutasi dari SKPD lain ke BKPSDM masih minim atau tidak seimbang dengan pegawai yg mutasi keluar SKPD lain. Namun demikian dengan jumlah personil yang ada tetap dioptimalkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana masih sangat minim terutama ketersediaan bangunan diklat yang layak untuk melaksanakan kegiatan kediklatan sehingga pelaksanaan kediklatan menjadi terhambat, hal ini merupakan permasalahan utama yang mewarnai perjalanan BKPSDM tahun 2021.

3.7. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Dalam mewujudkan sasaran BKPSDM Kab. Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021 mengelola 2 program, 10 Kegiatan dan 27 subkegiatan yaitu:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

- ❖ Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- ❖ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ✓ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
- I.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
 - ✓ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- I.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- I.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- I.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - ✓ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

- 2.1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - ✓ Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - ✓ Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN
 - ✓ Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

- 2.2. Mutasi dan Promosi ASN
 - ✓ Pengelolaan Promosi ASN
- 2.3. Pengembangan Kompetensi ASN
 - ✓ Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 - ✓ Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
 - ✓ Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - ✓ Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
- 2.4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - ✓ Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - ✓ Pembinaan Disiplin ASN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tanjung Jabung Barat yang terdiri dari 6 Kegiatan dan 17 Sub kegiatan, untuk mencapai tujuan tersebut dialokasi anggaran Rp. 8.791.403.712,- dengan tingkat realisasi keuangan Rp. 6.640.682.797,- (75,54%) dan rata-rata realisasi fisik 100%. Adapun output yang dihasilkan meliputi penyediaan surat menyurat, listrik, air, alat tulis, dan barang cetakan. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD alokasi anggaran Rp. 51.249.774 dengan realisasi anggaran Rp. 51.186.900,- (99,88%) dan realisasi fisik 100%
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN alokasi anggaran Rp. 7.480.875.899 dengan realisasi anggaran Rp. 5.568.410.574 (74,44%) dan realisasi fisik (100%)
 - ✓ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN alokasi anggaran Rp. 162.351.500 dengan realisasi anggaran Rp. 156.480.000 (96,38%) dan realisasi fisik (100%).

- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD alokasi anggaran Rp. 35.249.800 dengan realisasi anggaran Rp. 35.230.000 (99,94%) dan realisasi fisik (100%)
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
- ✓ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya alokasi anggaran Rp. 26.000.000 dengan realisasi anggaran Rp. 25.200.000 (96,92%) dan realisasi fisik (100%)
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor alokasi anggaran Rp. 8.437.957 dengan realisasi Rp. 8.431.800 (99,93%) dan realisasi fisik (100%)
 - ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi anggaran Rp. 76.276.720 dengan realisasi Rp. 75.980.400 (99,61%) dan realisasi fisik (100%)
 - ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor alokasi anggaran Rp. 17.600.000 dengan realisasi Rp. 3.600.000 (20,45%) dan realisasi fisik (21,00%)
 - ✓ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan alokasi anggaran Rp. 35.199.813 dengan realisasi Rp. 33.568.200 (95,36%) dan realisasi fisik (100%)
 - ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan alokasi anggaran Rp. 8.400.000 dengan realisasi Rp. 3.750.000 (44,64%) dan realisasi fisik (69,00%)
 - ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD alokasi anggaran Rp. 505.090.000 dengan realisasi Rp. 306.113.450 (60,61%) dan realisasi fisik (100%).
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
- ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat alokasi anggaran Rp. 4.999.000 dengan realisasi Rp. 4.525.900 (90,54%) dan realisasi fisik (100%).
 - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik alokasi anggaran Rp. 60.996.400 dengan realisasi Rp. 60.906.673 (99,85%) dan realisasi fisik (100%).
 - ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor alokasi anggaran Rp. 59.284.849 dengan realisasi Rp. 59.269.300 (99,97%) dan realisasi fisik (100%).

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan alokasi anggaran Rp. 178.400.000 dengan realisasi Rp. 168.860.600 (94,65%) dan realisasi fisik (100%).
 - ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya alokasi anggaran Rp. 25.030.000 dengan realisasi Rp. 23.210.000 (92,73%) dan realisasi fisik (100%).
 - ✓ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya alokasi anggaran Rp. 55.962.000 dengan realisasi Rp. 55.959.000 (99,99%) dan realisasi fisik (100%).

❖ PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

- I. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - ✓ Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian alokasi anggaran Rp. 29.499.800 dengan realisasi Rp. 29.449.800 (99,83%) dan realisasi fisik (100%).
 - ✓ Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN alokasi anggaran Rp. 21.350.000 dengan realisasi Rp. 21.350.000 (100%) dan realisasi fisik (57,00%)
 - ✓ Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN alokasi anggaran Rp. 14.549.974 dengan realisasi Rp. 14.049.600 (96,56%) dan realisasi fisik (100%).
- 2.5. Mutasi dan Promosi ASN
 - ✓ Pengelolaan Promosi ASN alokasi anggaran Rp. 356.034.275 dengan realisasi Rp. 69.780.000 (19,60%) dan realisasi fisik (0%).
- 2.6. Pengembangan Kompetensi ASN
 - ✓ Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN alokasi anggaran Rp. 155.949.859 dengan realisasi Rp. 80.557.500 (51,66%) dan realisasi fisik (69,00%)
 - ✓ Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN alokasi anggaran Rp. 1.484.110.872 dengan realisasi Rp. 515.133.857 (34,71%) dan realisasi fisik (52,00%).
 - ✓ Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN alokasi anggaran Rp. 909.193.157 dengan realisasi Rp. 795.225.225 (87,46%) dan realisasi fisik (93,00%).

- ✓ Pembinaan Jabatan Fungsional ASN alokasi anggaran Rp. 41.864.693 dengan realisasi Rp. 37.950.000 (90,65%) dan realisasi fisik (100%).

2.7. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- ✓ Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan alokasi anggaran Rp. 84.303.793 dengan realisasi Rp. 68.545.000 (81,31%) dan realisasi fisik (91,00%).
- ✓ Pembinaan Disiplin ASN alokasi anggaran Rp. 22.650.000 dengan realisasi Rp. 22.650.000 (100%) dan realisasi fisik (100%).

Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2021 terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Antara lain Program Kepegawaian Daerah pada:

I. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

- ✓ Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN alokasi anggaran Rp. 155.949.859 dengan realisasi Rp. 80.557.500 (51,66%) dan realisasi fisik (69,00%), hal ini disebabkan:
 - Dari 37 Calon Taruna Sekolah Tinggi Transportasi Darat yang lulus tahap pertama, hanya 27 orang yang mengikuti pembekalan Calon Taruna Sekolah Tinggi Transportasi Darat.
 - Seleksi Calon Taruna Sekolah Tinggi Perikanan dimasa pandemi Covid-19 dialihkan kepanitia pusat.
- ✓ Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN alokasi anggaran Rp. 1.484.110.872 dengan realisasi Rp. 515.133.857 (34,71%) dan realisasi fisik (52,00%). Hal ini disebabkan:
 - Untuk pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional Pola Kontribusi terkendala karena pandemi Covid-19.
 - Bimtek Manajemen PNS ini terkendala dikarenakan adanya beberapa pejabat eselon II dan III yang pelaksanaan tugas/ dinas lainnya bertepatan dengan pembahasan RAPBD TA. 2022).

2. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

- ✓ Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN alokasi anggaran Rp. 21.350.000 dengan realisasi Rp. 21.350.000 (100%) dan realisasi fisik (57,00%), hal ini disebabkan oleh:
 - Penutupan layanan tatap muka di Kantor Regional VII Palembang untuk sementara waktu.
 - Keterbatasan informasi yang disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah ke Pegawai Negeri Sipil.

3. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan alokasi anggaran Rp. 84.303.793 dengan realisasi Rp. 68.545.000 (81,31%) dan realisasi fisik (91,00%), hal ini disebabkan oleh:
 - Berkas/ Dokumen yang diusulkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
 - Usul yang masuk dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah tidak memenuhi target.
 - Usul kepangkatan Guru tidak memenuhi target.

❖ Solusi

Berdasarkan permasalahan diatas, untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang maka dipandang perlu untuk :

- Dokumen Karis/ Karsu/ Karpeg yang ada dikirimkan melalui Pos
- Meningkatkan informasi terkait surat edaran yang diterbitkan oleh BKPSDM untuk semua pengurusan kepegawaian
- Adanya keharusan untuk mengikuti pembekalan calon taruna STTD bagi calon taruna yang lulus tahap pertama jika ingin di fasilitasi Pemda
- Ditahun 2022 direncanakan akan berupaya meningkatkan peserta Diklat Teknis dan Fungsional
- Menghindari pelaksanaan Diklat Teknis/ Bimtek diakhir tahun
- Berkoordinasi kepada OPD terkait agar mengakomodir seluruh usul kenaikan pangkat.

3.8. REALISASI ANGGARAN

Guna melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Belanja Operasi BKPSDM Kab. Tanjung Jabung Barat tahun 2021 sebesar Rp. 11.910.910.135,- yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 7.480.875.899,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.430.034.236,- dengan realisasi anggaran BKPSDM Kab. Tanjung Jabung Barat sebesar Rp. 8.295.373.779,- yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 5.568.410.574,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.726.963.205,-.

Data anggaran dan realisasi APBD BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 31 Desember 2021 tersaji sebagai berikut:

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Tahun 2021

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI		
	JUMLAH	PROPORSI	KEUANGAN	%	FISIK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.791.403.712	73,81	6.640.682.797	75,54	100
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.249.774	0,43	51.186.900	99,88	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.249.774	0,43	51.186.900	99,88	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.678.477.199	64,47	5.760.120.574	75,02	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.480.875.899	62,81	5.568.410.574	74,44	100
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	162.351.500	1,36	156.480.000	96,38	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	35.249.800	0,30	35.230.000	99,94	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.000.000	0,22	25.200.000	96,92	100
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26.000.000	0,22	25.200.000	96,92	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	651.004.490	5,47	431.443.850	66,27	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	8.437.957	0,07	8.431.800	99,93	100

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.276.720	0,64	75.980.400	99,61	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.600.000	0,15	3.600.000	20,45	21
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.199.813	0,30	33.568.200	95,36	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.400.000	0,07	3.750.000	44,64	69
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	505.090.000	4,24	306.113.450	60,61	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.280.249	1,05	124.701.873	99,54	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.999.000	0,04	4.525.900	90,54	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.996.400	0,51	60.906.673	99,85	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.284.849	0,50	59.269.300	99,97	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	259.392.000	2,18	248.029.600	95,62	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	178.400.000	1,50	168.860.600	94,65	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.030.000	0,21	23.210.000	92,73	100
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.962.000	0,47	55.959.000	99,99	100
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.119.506.423	26,19	1.654.690.982	53,04	83,00
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	65.399.774	0,55	64.849.400	99,16	100
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	29.499.800	0,25	29.449.800	99,83	100
Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	21.350.000	0,18	21.350.000	100,00	100
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	14.549.974	0,12	14.049.600	96,56	100
Mutasi dan Promosi ASN	356.034.275	2,99	69.780.000	19,60	27,95
Pengelolaan Promosi ASN	356.034.275	2,99	69.780.000	19,60	25,97
Pengembangan Kompetensi ASN	2.591.118.581	21,75	1.428.866.582	55,14	79,25
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	155.949.859	1,31	80.557.500	51,66	65,00

Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1.484.110.872	12,46	515.133.857	34,71	52,00
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	909.193.157	7,63	795.225.225	87,46	100
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	41.864.693	0,35	37.950.000	90,65	100
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	106.953.793	0,90	91.195.000	85,27	95,5
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	84.303.793	0,71	68.545.000	81,31	91
Pembinaan Disiplin ASN	22.650.000	0,19	22.650.000	100,00	100
TOTAL ANGGARAN	11.910.910.135		8.295.373.779	69,65	100

Sumber Data Sub Bagian Keuangan BKPSDM

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 yaitu untuk tahun pertama, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggung jawabkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 2 (dua) sasaran yang di nilai berdasarkan 6 indikator kinerja, dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan diperoleh 4 Indikator yang dikategorikan berhasil.

Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut diatas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang, kita semua berharap Laporan Kinerja ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada masa yang akan datang.

4.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Secara keseluruhan capaian kinerja tersebut diatas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Sesuai hasil analisis capaian kinerja pada tahun 2021 dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diarahkan untuk memenuhi sumber daya aparatur yang professional,
2. Melakukan pendataan sebagai bahan pengambilan kebijakan,
3. Melakukan updating data/peremajaan data di SAPK secara berkala sebagai data dasar untuk melaksanakan pelayanan berbasis e-Government Kepegawaian,

4. Meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi kepegawaian mulai dari pengadaan pegawai, penempatan, pengembangan karir, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman, pemindahan hingga pensiun sehingga dapat dipertanggung jawabkan,
5. Mengoptimalkan koordinasi lebih intens dalam membangun hubungan kerjasama yang lebih baik dengan berbagai pihak yang ada di Kabupaten, Provinsi maupun Pusat, yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi,
6. Meningkatkan motivasi kerja dan komitmen untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategis.